

**PENGARUH PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* DAN PENGAWASAN
INTERNAL TERHADAP KINERJA ORGANISASI MELALUI
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LEMBAGA
ADMINISTRASI NEGARA**

¹Meyzi Wiguna Putri, ²Zulkifli

¹²Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila

E-mail : wigunameyzi@gmail.com

ABSTRACT

This study entitled Effect of Implementation of Good Governance and Internal Control on Performance Through Organization for Procurement of Goods / Services in National Institute of Public Administration. The purpose of this study was to determine the influence of good governance and the internal control on the performance of the organization as well as the influence of good governance and internal control to organizational performance through the implementation of the procurement of goods/services. This research was conducted at the National Institute of Public Administration of the Republic of Indonesia. The method used in this research is descriptive method with quantitative approach to the survey questionnaire, in which samples of this study are employees involved in internal control (Auditor, Supervisory Government Inspectorate LAN), procurement (Committing Officer, Working Group on Procurement and services, Procurement Officer, official Receiver the Works, Management of Budget and Planning) and employees in the work unit obtain the services of supervision and procurement of goods/services that are scattered throughout the National Institute of Public Administration. The technique of data processing through validity test using Person Moment Correlation and reliability test using Chonbrach'Alpha. From the research that is done, then the resulting analysis showed that the implementation of Good Governance and Internal Control positive and significant impact on Procurement of Goods / Services and Implementation of Good Governance, Internal Control and Implementation of Goods / Services Procurement positive and significant impact on Organizational Performance.

Keywords: Good governance, internal control, the procurement of goods / services and organizational performance

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pelaksanaan *Good Governance* dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Organisasi Melalui Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lembaga Administrasi Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh pelaksanaan *good governance* dan pengawasan internal terhadap kinerja organisasi serta pengaruh pelaksanaan *good governance* dan pengawasan internal terhadap kinerja organisasi melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini dilakukan pada instansi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan kuantitatif melalui pendekatan survei kuisioner, dimana sampel penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam pengawasan internal (Auditor, Pengawas Pemerintah pada Inspektorat LAN), pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat

Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pengelola Anggaran dan Perencana) dan pegawai pada unit kerja yang memperoleh layanan dari pelaksanaan pengawasan dan pengadaan barang/jasa yang tersebar diseluruh Lembaga Administrasi Negara. Adapun teknik pengolahan data melalui uji Validitas menggunakan Korelasi Person Moment dan Uji Realibilitas menggunakan Chonbrach'Alpha. Untuk menguji hipotesis digunakan Structural Equation Model (SEM) yang dijalankan dengan perangkat lunak Lisrel digunakan dalam menganalisis data. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dihasilkan analisa menunjukkan bahwa Pelaksanaan *Good Governance* dan Pengawasan Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa serta Pelaksanaan *Good Governance*, Pengawasan Internal dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Organisasi.

Kata kunci : *Good governance*, pengawasan internal, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kinerja organisasi

PENDAHULUAN

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dituntut untuk menjadi contoh (role model) bagi reformasi administrasi diharapkan mampu membuktikan diri sebagai organisasi pemerintah berkinerja tinggi.

Guna menunjang kegiatan dan kelancaran tupoksi Lembaga Administrasi Negara yang berkaitan dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) maka pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan di Lembaga Administrasi Negara yang disertai dengan pengawasan internal agar pelaksanaannya tepat sasaran.

Pengadaan barang dan jasa dalam suatu organisasi adalah aktivitas pendukung yang penting diantara fungsi-fungsi bisnis, dimana aktivitas ini berpotensi untuk mendukung kinerja dari organisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan *good governance* dan pengawasan internal terhadap kinerja organisasi dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Dengan pelaksanaan *good governance* yang baik akan berpengaruh dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimana prinsip *good governance* akan menciptakan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang baik, sedangkan pengawasan internal yang mengawal proses pengadaan barang/jasa akan menciptakan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang baik sehingga akan terciptanya kinerja organisasi yang berkinerja baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “ **PENGARUH PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA ORGANISASI MELALUI PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**”

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Kinerja Organisasi

Konsep kinerja (*Performance*) dapat didefinisikan sebagai sebuah pencapaian hasil atau *degree of accomplishment* (Rue dan byars, 1981 dalam Keban 1995). Hal ini berarti bahwa, kinerja suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa kinerja merupakan hasil dari kegiatan yang akan dicapai atau telah dicapai berdasarkan penggunaan anggaran berbasis kualitas dan kuantitas yang terukur.

Kinerja organisasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mengacu kepada Penilaian Kinerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang diatur dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama LAN dimana Pengelolaan Kinerja Organisasi yang didasari pada Nilai Kerja Organisasi (NGO) unit kerja, dimana Sasaran Strategis (SS) yang didasari beberapa kriteria salah satunya kriteria *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi *perspektif financial, perspektif customer, perspektif internal process dan perspektif learn and growth*

Good Governance

Dalam buku Lembaga Administrasi Negara “Akuntabilitas dan *Good Governance*” merumuskan sembilan aspek fundamental dalam *good governance* yang harus diperhatikan yaitu :

1. Partisipasi (*participation*)
Semua warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yaitu kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.
2. Taat Hukum (*rule of law*)
Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama hukum yang berlaku untuk perlindungan hak azasi manusia.
3. Transparansi (*transparency*)
Transparansi adalah unsur lain yang menopang terwujudnya *good governance* yang menghasilkan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.
4. Daya Tangkap (*Responsiveness*)
Lembaga-lembaga negara/badan usaha harus berusaha melayani setiap *stakeholders*. Responsif terhadap aspirasi masyarakat.
5. Berorientasi Konsensus (*consensus orientation*)
Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedural.
6. Berkeadilan
Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
7. Efektivitas dan Efisien (*effectiveness and efficiency*)
Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
8. Akuntabilitas (*accountability*)

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga.

9. Visi Strategi (*strategy vision*)

Para pemimpin dan masyarakat memiliki visi jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan dalam pembangunan.

Dari uraian tentang *good governance* yang dikemukakan oleh Lembaga Administrasi Negara *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah kesinergian antara pemerintah, dunia usaha atau sektor swasta dan masyarakat (*civil society*). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab akan dicapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki interaksi dan jaringan yang setara serta sinerjik.

Pengawasan Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 19 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

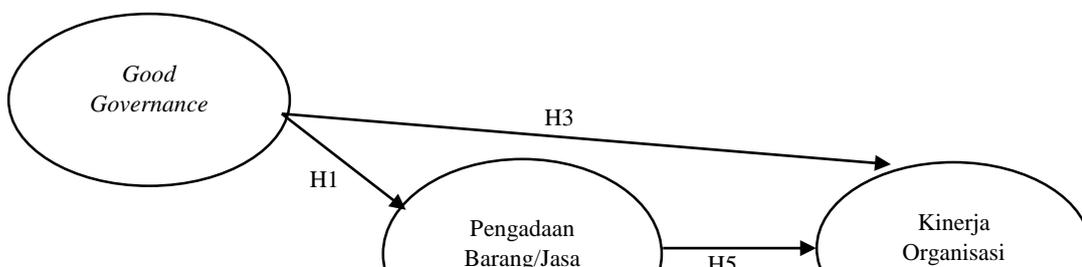
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengertian pengadaan barang dan jasa menurut Sutedi (2012:7) yaitu mencakup penjelasan dari seluruh proses sejak awal perencanaan, persiapan, perijinan, penentuan pemenang lelang hingga tahap pelaksanaan dan proses administrasi dalam pengadaan barang, pekerjaan atau jasa seperti jasa konsultasi teknis, jasa konsultasi keuangan, jasa konsultasi hukum atau jasa lainnya.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.

B. Kerangka Berpikir

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa bagaimana pengaruh pelaksanaan barang dan jasa pemerintah serta pengawasan internal untuk menunjang kinerja organisasi melalui pelaksanaan *good governance*. Sehingga agar penelitian ini tetap fokus, maka secara skematik kerangka analisis penelitian ini dijelaskan pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Model Kerangka Berpikir

Dari kerangka berpikir tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat dua variabel independen yaitu *Good Governance* dan Pengawasan Internal, variabel perantara yaitu Pengadaan Barang/Jasa dan variabel dependent Kinerja Organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara *Good Governance*, Pengawasan internal terhadap Kinerja Organisasi melalui implementasi pelaksanaan Pengadaan barang/jasa.

C. Hipotesa Penelitian

Mengacu pada kerangka berpikir, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : *Good Governance* memberikan pengaruh terhadap Pengadaan Barang/Jasa
- H2 : Pengawasan Internal memberikan pengaruh terhadap Pengadaan Barang/Jasa
- H3 : *Good Governance* memberikan pengaruh terhadap Kinerja Organisasi
- H4 : Pengawasan Internal memberikan pengaruh terhadap Kinerja Organisasi
- H5 : Pengadaan Barang/Jasa memberikan pengaruh terhadap Kinerja Organisasi

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan kuantitatif yaitu melakukan survei kuisioner untuk memperoleh data primer dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen organisasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi perihal data penelitian, sedangkan metode penelitian kuantitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel dimana variabel bebas (X) yaitu *Good Governance* (X1), Pengawasan Internal (X2), variabel terikat (Z) yaitu Kinerja Organisasi dan variabel antara (Y) yaitu Pengadaan barang dan jasa

B. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah semua pegawai yang pegawai yang terlibat dalam pengawasan internal (Auditor, Pengawas Pemerintah pada Inspektorat LAN), pengadaan barang dan jasa (Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pengelola Anggaran dan Perencana) dan pegawai pada unit kerja yang memperoleh layanan dari pelaksanaan pengawasan dan pengadaan barang/jasa yang tersebar diseluruh Lembaga Administrasi baik di Instansi Pusat maupun Daerah

Penentuan jumlah sampel untuk analisis *Structural Equation Modeling* menggunakan rumus (Ferdinand, 2006) yaitu 5-10 kali dari jumlah indikator yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 43 indikator sehingga jumlah sampel yang diperlukan antara 215 – 430 responden.

C. Operasional Variabel Penelitian

Variabel Kinerja Organisasi (KO)

Kinerja organisasi yang digunakan pada penelitian ini adalah mengacu kepada Penilaian Kinerja di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang diatur dalam Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama LAN dimana Pengelolaan Kinerja Organisasi yang didasari pada Nilai Kerja Organisasi (NGO) unit kerja, dimana Sasaran Strategis (SS) yang didasari beberapa kriteria salah satunya kriteria *Balance Score Card* (BSC) yang meliputi : *perspektif financial* (Penyerapan anggaran, efisiensi dan efektif, biaya operasional), *perspektif customer* (Kejelasan dan kemudahan, Kedisiplinan dan kemampuan, Keramahan dan kepedulian, Kualitas layanan), *perspektif internal process* (Proses rekrutmen, Keterampilan, Tingkat kesalahan, Fasilitas pendukung) dan *perspektif learn and growth* (Sistem kompensasi, Pelatihan, Kreativitas dan inisiatif, Akses informasi, Penghargaan).

Variabel Good Governance (GG)

Definisi *Good Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik, hubungan yang sinergis antara pemerintah, Dunia usaha/swasta dan masyarakat dimana pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, dunia usaha menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan masyarakat berperan aktif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Untuk indikator yang digunakan dari masing-masing dimensi tersebut adalah : Transparansi (Keterbukaan Informasi, Sosialisasi Program dan Kebijakan), Akuntabilitas (Kejelasan tugas, fungsi dan wewenang, Penyusunan LAKIP), Responsibilitas (Partisipasi, Tanggap terhadap aspirasi), Efektivitas dan Efisien (Tepat guna, Optimal) dan Adil tidak diskriminatif (Hak individu, Perlakuan yang adil)

Variabel Pengawasan Internal (PI)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka pada penelitian ini dimensi yang digunakan untuk mengukur pengawasan internal adalah Perencanaan Pengawasan, Pelaksanaan Pengawasan, Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.

Untuk indikator yang digunakan dari masing-masing dimensi tersebut adalah : Perencanaan Pengawasan (Program kerja, Objek pemeriksaan, Keseuainan SOP dan

perundangan yang berlaku), Pelaksanaan Pengawasan (Proses pelaksanaan, Audit pengawasan internal, Review Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah), Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (Ekspose, Hasil temuan, Tindak lanjut)

Variabel Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka pada penelitian ini yang digunakan untuk mengukur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah digunakan dimensi dan indikator : Transparansi (Keterbukaan informasi, Proses sesuai dengan SOP dan peraturan), Akuntabilitas (Ketaatan terhadap ketentuan, Ketaatan terhadap prosedur), Efektif dan efisien (Tepat guna, Optimal), dan Adil/tidak diskriminatif (Kesempatan bersaing, Persyaratan yang tidak diskriminatif)

Teknik Analisis Data

Model yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model struktur berjenjang dan untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka teknik analisis yang digunakan adalah SEM (*Structural Equation Modelling*) yang dioperasikan melalui program Lisrel.

Pemodelan melalui SEM juga memungkinkan seorang peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat regresif maupun dimensional (yaitu mengukur apa dimensi-dimensi dari sebuah konsep) (Ferdinand, 2006). Menganalisis model penelitian dengan SEM dapat mengidentifikasi dimensi-dimensi sebuah konstruk dan pada saat yang sama mengukur pengaruh atau derajat hubungan antar faktor yang telah diidentifikasi dimensi-dimensinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 219 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki-laki	156	71,23
2.	Perempuan	63	28,77
	Total	219	100

Sumber: Data Kuesioner, 2019

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa kelompok responden laki-laki memiliki persentase lebih besar yaitu sebanyak (156 responden) 71,23%, sedangkan responden perempuan memiliki persentase lebih kecil sebesar (63 responden) 28,77%. Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki.

Tabel 2. Jumlah Responden berdasarkan Usia

No	Umur	Jumlah	%
1.	24 – 35 Tahun	78	35,62

No	Umur	Jumlah	%
2.	36 – 45 Tahun	81	36,99
3.	46 – 55 Tahun	55	25,11
4.	56 – 60 Tahun	5	2,28
	Total	219	100

Sumber: Data Kuesioner, 2019

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat Komposisi tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia 36 - 45 tahun, yang berumur di bawah 45 tahun sebesar 36,99% pada usia di bawah 45 tahun tersebut merupakan usia produktif dan matang dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam menjawab pertanyaan pada kuesioner.

Tabel 3. Jumlah Responden berdasarkan Masa Kerja

No	Pengelompokan Masa Kerja	Jumlah	%
1.	Di bawah 10 Tahun	42	19,18
2.	11 – 20 Tahun	108	49,32
3.	21 – 30 Tahun	50	22,83
4	Diatas 30 Tahun	19	8,68
	Total	219	100

Sumber: Data Kuesioner, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat Masa kerja menunjukkan pengalaman yang dimiliki oleh individu pada bidang kerja mereka. Berdasarkan masa kerja di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sebagian besar adalah 11-20 tahun yaitu 108 orang (49,32%), masa kerja 21-30 tahun yaitu 50 orang (22,83%), dengan masa kerja di bawah 10 tahun yaitu 42 orang (19,18%), dan terakhir adalah responden dengan masa kerja di atas 30 tahun yaitu 19 orang (8,68%)

Tabel 4. Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	S-3	8	3,65
2.	S-2	51	23,29
3.	S-1/DIV	143	65,30
4	D-III	12	5,48
5.	SLTA	5	2,28
	Total	219	100

Sumber: Data Kuesioner, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat Kelompok responden dengan pendidikan terakhir Doktor (S-3) memiliki persentase sebanyak (8 responden) 3,63%, pendidikan Pasca Sarjana/S2 memiliki persentase sebanyak (51 responden) 23,29%, pendidikan terakhir Sarjana/S1 memiliki persentase sebanyak (143 responden) 65,30 %, pendidikan terakhir Sarjana Muda/D3 memiliki persentase sebanyak (12 responden) 5,48 %, pendidikan terakhir SLTA memiliki persentase sebanyak (5 responden) 2,28 %. Di dalam kelompok responden ini pendidikan terakhir Sarjana/S1 memiliki persentase tertinggi yaitu sebanyak (143 responden) 65,30 %. Hal ini merupakan peluang untuk mengembangkan karier dan pendidikan setiap pegawai yang ada dalam jabatan yang sesuai dengan kompetensinya.

B. Pengujian Model Pengukuran

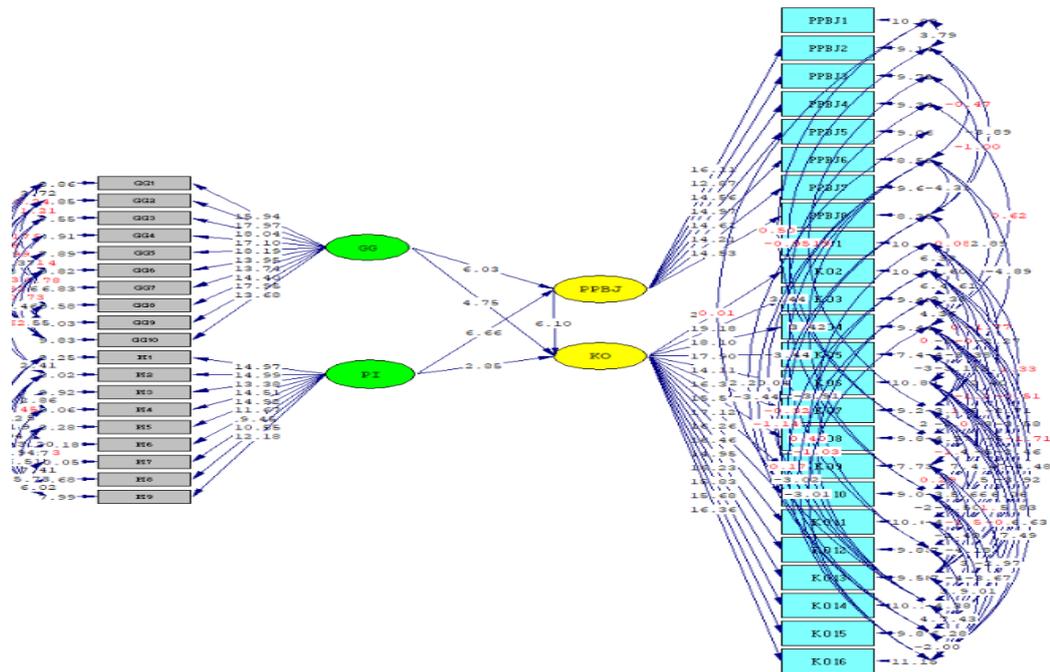
Dalam pengujian model pengukuran dilakukan uji validitas dan reabilitas antar variabel. Pada pengujian ini indikator dinyatakan valid jika nilai *loading factor* > 0,5 dan *T-Value* > 1,96. Untuk uji reabilitas dilakukan dengan menghitung nilai AVE dan CR konstruk, dimana dinyatakan reabel jika nilai AVE > 0,5 dan nilai CR > 0,7. Hasil uji validitas dan reabilitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Variabel	Indikator	Loading Faktor>0.5	T. Value>1,96	Validitas	AVE	CR	Reliabilitas
Good Governance (GG)	GG1	0,87	16,28	VALID	0,7435	0,9665	Reliabel
	GG2	0,92	17,87	VALID			
	GG3	0,92	17,96	VALID			
	GG4	0,89	16,86	VALID			
	GG5	0,94	18,55	VALID			
	GG6	0,82	14,75	VALID			
	GG7	0,78	13,63	VALID			
	GG8	0,82	14,64	VALID			
	GG9	0,93	18,32	VALID			
	GG10	0,82	14,71	VALID			
Pengawasan Internal (PI)	PI1	0,84	15,12	VALID	0,5460	0,9049	Reliabel
	PI2	0,82	14,61	VALID			
	PI3	0,79	13,8	VALID			
	PI4	0,82	14,57	VALID			
	PI5	0,79	13,88	VALID			
	PI6	0,71	11,8	VALID			
	PI7	0,65	10,52	VALID			
	PI8	0,64	10,31	VALID			
	PI9	0,64	10,34	VALID			
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)	PPBJ1	0,76	13,18	VALID	0,7466	0,9592	Reliabel
	PPBJ2	0,86	15,84	VALID			
	PPBJ3	0,8	14,26	VALID			
	PPBJ4	0,91	17,34	VALID			
	PPBJ5	0,92	17,61	VALID			
	PPBJ6	0,89	16,78	VALID			
	PPBJ7	0,88	16,57	VALID			
	PPBJ8	0,88	16,47	VALID			
Kinerja Organisasi (KO)	KO1	0,8	14,15	VALID	0,7782	0,9825	Reliabel
	KO2	0,84	15,51	VALID			

KO3	0,86	16,06	VALID
KO4	0,84	15,26	VALID
KO5	0,95	18,83	VALID
KO6	0,83	15,11	VALID
KO7	0,93	18,06	VALID
KO8	0,9	17,32	VALID
KO9	0,91	17,37	VALID
KO10	0,86	15,94	VALID
KO11	0,92	17,76	VALID
KO12	0,88	16,51	VALID
KO13	0,91	17,4	VALID
KO14	0,89	16,79	VALID
KO15	0,86	16,07	VALID
KO16	0,92	17,83	VALID

Berikut merupakan model *standardized loading factor* dalam penelitian mengenai pengaruh *good governance* dan pengawasan internal terhadap kinerja organisasi dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai variabel intevening:



Chi-Square=178.6, df=113.2, P=value=0.07721,

Gambar 2. Model struktural (*Standardized Solution*)

Berdasarkan pada gambar 2 di atas bahwa nilai *loading factor* > 0.5 pada *Standardized Solution* telah memenuhi syarat validitas model pengukuran.

analisis kecocokan keseluruhan model dapat dilihat dari angka statistik sebagai berikut:

Tabel 6. *Goodness of Fit Statistics*

<i>Fit Measure</i>	<i>Good Fit</i>	<i>Marginal Fit</i>	Hasil	Kesimpulan
p-value	$0.05 < p \leq 1.00$	$0.000 < p \leq 0.05$	0.077	<i>Good fit</i>
RMSEA	$0.05 < RMSEA \leq 0.08$	$0.045 \leq RMSEA \leq 0.10$	0.079	<i>Good fit</i>
NFI	$0.90 \leq NFI \leq 1.00$	$0.80 \leq NFI < 0.90$	0.97	<i>Good Fit</i>
NNFI	$0.90 \leq NNFI \leq 1.00$	$0.80 \leq NNFI < 0.90$	0.98	<i>Good Fit</i>
IFI	$0.90 \leq IFI \leq 1.00$	$0.80 \leq IFI < 0.90$	0.98	<i>Good Fit</i>
CFI	$0.90 \leq CFI \leq 1.00$	$0.80 \leq CFI < 0.90$	0.98	<i>Good Fit</i>
RFI	$0.90 \leq RFI \leq 1.00$	$0.80 \leq RFI < 0.90$	0.96	<i>Good Fit</i>
GFI	$0.90 \leq GFI \leq 1.00$	$0.60 \leq CFI < 0.90$	0.82	<i>Marginal Fit</i>
AGFI	$0.90 \leq AGFI \leq 1.00$	$0.50 \leq AGFI < 0.90$	0.61	<i>Marginal Fit</i>

Sumber: *Output LISREL Hasil Olahan Penelitian, 2019*

Berikut *structural equation model* dari model yang di uji :

Structural Equations

$$PPBJ = 0.46*PI + 0.41*GG, \text{ Errorvar.} = 0.36, R^2 = 0.64$$

(0.069)	(0.068)	(0.056)
6.66	6.03	6.35

$$KO = 0.45*PPBJ + 0.17*PI + 0.30*GG, \text{ Errorvar.} = 0.29, R^2 = 0.71$$

(0.074)	(0.061)	(0.063)	(0.042)
6.10	2.85	4.75	6.97

Tabel 7. Hasil analisis model struktural

Hipotesis	Path	Estimate	T-Value	P-Value	Kesimpulan
H1	GG – PPBJ	0.41	6.03	0.068	Data mendukung hipotesa
H2	PI – PPBJ	0.46	6.66	0.069	Data mendukung hipotesa
H3	GG – KO	0.30	4.75	0.063	Data mendukung hipotesa
H4	PI – KO	0.17	2.85	0.061	Data mendukung hipotesa
H5	PPBJ – KO	0.45	6.10	0.074	Data mendukung hipotesa

Sumber: data olahan, 2019

Tabel 8. Pengaruh langsung dan tidak langsung X1, X2 terhadap Y dan Z

Variabel	Langsung	Tidak Langsung (melalui Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa)	Total
<i>Good Governance</i> → Kinerja Organisasi	0.30	-	0.30
Pengawasan Internal → Kinerja Organisasi	0.17	-	0.17
<i>Good Governance</i> → Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa → Kinerja Organisasi	0.30	$0.41 \times 0.45 = \mathbf{0.1845}$	0.4845
Pengawasan Internal → Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa → Kinerja Organisasi	0.17	$0.46 \times 0.45 = \mathbf{0.2070}$	0.3770
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa → Kinerja Organisasi	0.45	-	0.45

Rangkuman hasil pengujian hipotesis berdasarkan hasil uji *structural model* di bawah ini bahwa seluruh hubungan antar variabel mengalami pengaruh positif setiap hubungan variabelnya, yakni sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

Berikut ini merupakan hipotesis 1 yang menjelaskan pengaruh *good governance* terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lembaga Administrasi Negara. Berdasarkan dari pengolahan data diketahui bahwa t-value pada pengaruh antara *good governance* terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah sebesar 6.03 dan nilai *path coefficient* (p) sebesar 0.41. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-value di atas 1.96 dan nilai (p) di atas 0.05 yang berarti terdapat pengaruh antara *good governance* terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa, hal ini mendukung hipotesis 1 sehingga dapat diambil

kesimpulan bahwa penerapan prinsip *good governance* perlu dilaksanakan guna mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang baik.

2. Hipotesis 2

Berikut ini merupakan hipotesis 2 yang menjelaskan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lembaga Administrasi Negara. Berdasarkan dari pengolahan data diketahui bahwa t-value pada pengaruh antara pengawasan internal terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah sebesar 6.66 dan nilai *path coefficient* (p) sebesar 0.46. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-value di atas 1.96 dan nilai (p) di atas 0.05 yang berarti terdapat pengaruh antara pengawasan internal terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa, hal ini mendukung hipotesis 2 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa peran pengawasan internal berpengaruh guna mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang baik.

3. Hipotesis 3

Berikut ini merupakan hipotesis 3 yang menjelaskan pengaruh *good governance* terhadap kinerja organisasi di Lembaga Administrasi Negara. Berdasarkan dari pengolahan data diketahui bahwa t-value pada pengaruh antara *good governance* terhadap kinerja organisasi adalah sebesar 4.75 dan nilai *path coefficient* (p) sebesar 0.30. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-value di atas 1.96 dan nilai (p) di atas 0.05 yang berarti terdapat pengaruh antara *good governance* terhadap kinerja organisasi, hal ini mendukung hipotesis 3 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *good governance* berpengaruh guna mendukung kinerja organisasi yang baik.

4. Hipotesis 4

Berikut ini merupakan hipotesis 4 yang menjelaskan pengawasan internal terhadap kinerja organisasi di Lembaga Administrasi Negara. Berdasarkan dari pengolahan data diketahui bahwa t-value pada pengaruh antara pengawasan internal terhadap kinerja organisasi adalah sebesar 2.85 dan nilai *path coefficient* (p) sebesar 0.17. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-value di atas 1.96 dan nilai (p) di atas 0.05 yang berarti terdapat pengaruh antara pengawasan internal terhadap kinerja organisasi, hal ini mendukung hipotesis 4 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan internal berpengaruh guna mendukung kinerja organisasi yang baik.

5. Hipotesis 5

Berikut ini merupakan hipotesis 5 yang menjelaskan pengaruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap kinerja organisasi di Lembaga Administrasi Negara. Berdasarkan dari pengolahan data diketahui bahwa t-value pada pengaruh antara pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap kinerja organisasi adalah sebesar 6.10 dan nilai *path coefficient* (p) sebesar 0.45. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-value di atas 1.96 dan nilai (p) di atas 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t-value di atas 1.96 dan nilai (p) di atas 0.05 yang berarti terdapat pengaruh antara pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap kinerja organisasi, hal ini mendukung hipotesis 5 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpengaruh guna mendukung kinerja organisasi yang baik.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pelaksanaan prinsip *good governance* dan pengawasan internal terhadap kinerja organisasi melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lembaga Administrasi Negara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. *Good governance* berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan prinsip *good governance* akan menciptakan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang baik. *Good governance* yang paling mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tinggi adalah partisipasi seluruh pegawai secara aktif dan kritis dalam mewujudkan *good governance*.
2. Pengawasan internal berpengaruh positif terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengawasan internal akan menciptakan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang baik. Pengawasan internal yang paling mempengaruhi pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah program kerja perencanaan pengawasan terkait pengadaan barang dan jasa yang menjadi acuan pengawas dalam melaksanakan proses pengawasan. Pengawasan internal yang mengawal proses pengadaan barang/jasa dari awal proses akan memperkecil permasalahan yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa seperti penyerapan anggaran yang menumpuk diakhir tahun dan perbedaan antara perencanaan pengadaan dan realisasi anggaran.
3. *Good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan prinsip *good governance* akan mendorong terciptanya kinerja organisasi yang baik.
4. Pengawasan internal berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pengawasan internal akan menciptakan kinerja organisasi yang baik.
5. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang maksimal akan menciptakan kinerja organisasi yang baik. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang paling mempengaruhi adalah hasil dari proses pengadaan barang dan jasa yang tepat guna akan mendukung proses tupoksi organisasi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi pada Lembaga Administrasi Negara maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pengaruh *good governance* dapat dimaksimalkan dengan menyertakan partisipasi seluruh pegawai secara aktif dan kritis diperlukan dalam mewujudkan *good governance*. Dengan komitmen pimpinan untuk menerapkan dan memotivasi seluruh pegawai dalam melaksanakan prinsip *good governance* dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang akan dijalankannya setiap pegawai akan berdampak kepada peningkatan kinerja individu dan organisasi sehingga akan terciptanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel yang akan berdampak kepada kesejahteraan negara Republik Indonesia.
2. Memaksimalkan peran pengawasan internal dengan melaksanakan pengawasan dengan memperhatikan kesesuaian antara peta pengawasan dengan pelaksanaan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan sehingga memperkecil kemungkinan

penyimpangan yang akan menjadi temuan audit BPK sehingga akan berdampak kepada peningkatan kinerja organisasi Lembaga Administrasi Negara.

3. Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa harus dikawal sedemikian rupa agar tidak terjadi penyimpangan dikarenakan pada proses ini rawan sekali penyimpangan bila perlu pemberian kompensasi oleh pemerintah harus dilakukan secara adil sesuai dengan beban kerja dan resiko pekerjaan yang dipikul oleh pegawai yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa setiap pegawai akan terhindar dari KKN. Untuk output dari pengadaan diharapkan tepat guna tidak hanya bersifat menghabiskan anggaran untuk memenuhi target pencapaian penyerapan anggaran sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi dengan maksimal yang berimbas pada semakin baiknya kinerja pemerintah.
4. Mensosialisasikan seluruh peraturan yang terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pelaksanaan pengawasan agar terciptanya pemahaman yang sama antar pegawai yang terlibat dalam kegiatan tersebut baik di pusat maupun daerah.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas penambahan variabel yang tidak kalah pentingnya yaitu perencanaan baik dari segi perencanaan anggaran, perencanaan pengadaan maupun terkait perencanaan pengawasan. Selain itu juga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperbanyak sampel dengan memperluas jumlah instansi pemerintah yang dijadikan objek penelitian.
6. Bagi kalangan akademik, dengan terbuktinya ada pengaruh antara *good governance* dan pengawasan internal terhadap kinerja organisasi melalui pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lembaga Administrasi Negara, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian yang terkait untuk dapat memberikan inovasi-inovasi dalam dunia akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H Rahardian. 2018. *Pengaruh Sistem E-Procurement dan Kompetensi Terhadap Kinerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bogor*. Jurnal STIAMI.
- Achmad Budiono, Aziz Fathoni, Maria M Minarsih. 2016. *Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Keuangan Kodam IV Diponegoro Yang Berkedudukan di Semarang*. Journal of Management Vol. 2 No. 2.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 2004. *Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gajahmada University Press.
- Edy Supriyadi. 2014. *SPSS+Amos Statistical Data Analysis Perangkat Lunak Statistik Mengolah Data Untuk Penelitian*. In Media. Jakarta.
- Febby Fuji Astuti, Zunaidah. 2012. *Pengaruh Perubahan Sistem Pengadaan Barang/Jasa dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Bagian Pengadaan barang/Jasa di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan)*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya Vol. 10 No. 20 Desember 2012.

- Ferdinand, A. (2006), “*Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen : Aplikasi Model-model Rumit dalam Penelitian untuk Tesis Magister dan Disertasi Doktor*”, BP UNDIP. Semarang.
- Gapersz, Vincent. 2000. *Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard Dengan Six Sigma Untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hair Jr, J. F., Anderson, J. F., Tatham, R. And W. C. Black. 2010. *Multivariate Data Analisis with Readings*. Fourth Edition. Prentice Hall International Editions.
- Inpres No. 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Keban, Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori Dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta : LAN.
- Lia Herawati. 2018. *Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Good Governance Terhadap Kinerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang*. Jurnal STIAMI.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. STIM YKPN.
- Mahsum. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad Arifin Siregar. 2010. *Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Bengkulu*. Jurnal Undip.
- Mulyadi. 1984. *Pemeriksaan dalam Pengawasan*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nofianti, Leny dan Novie. 2014. *Factors Affecting Implementation of good government governance (GGG) and their implications towards performance accountability*. Procedia Social and Behavioral Sciences.
- Nur azlina, Ira Amelia. 2015. *Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan*. Jurnal Akuntansi Universitas Jember.
- Pahala Nainggolan. 2005. *Akuntansi Keuangan Yayasan dan Lembaga Nirlaba Sejenis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama LAN.

- Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 19 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Sedarmayanti. 2008. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sondang P. Siagian. 1984. *Filsafat Administrasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suprayitno. 2014. *Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 2 Bandung*. Jurnal ilmu Administrasi Volume XI No.1 April 2014.
- Sutedi. Adrian. 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Ed. 2*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syayuti. 2016. *Implementasi Good Governance Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Bungo (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan)*. Jurnal Ilmiah Universitas Terbuka.
- Victor Situmorang. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Bandung : Rineka Cipta.
- Wibowo. 2007. *Menejemen kinerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yusri. 2017. *Pengendalian dan Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jurnal Proteksi Volume 3, Nomor 2, Juli 2017.